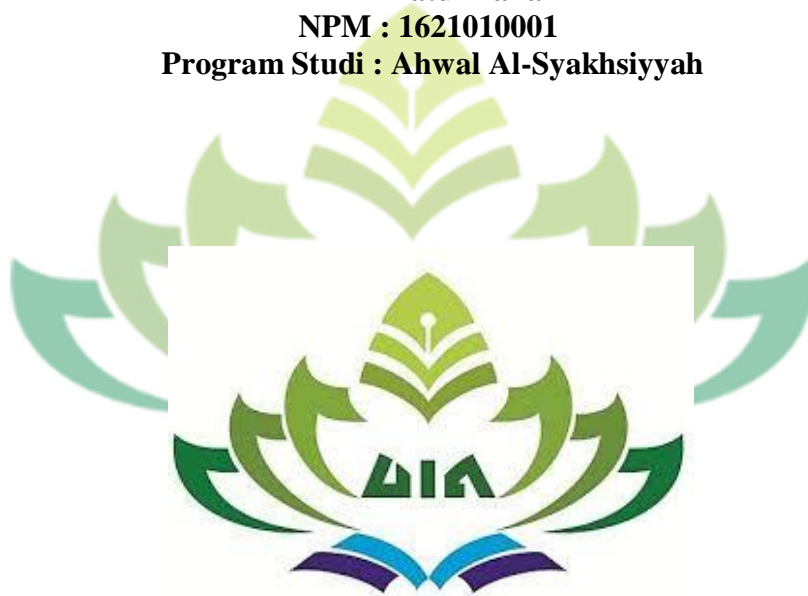


**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT TENTANG KESEPAKATAN SUAMI ISTRI UNTUK
MENUNDA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ANAK BELUM
MUMAYYIZ
(Studi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Khikmatul Laila
NPM : 1621010001
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT TENTANG KESEPAKATAN SUAMI ISTRI UNTUK
MENUNDA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ANAK BELUM
MUMAYYIZ**

(Studi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

KHIKMATUL LAILA

NPM : 1621010001

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik untuk ditempuh dibandingkan tetap bersatu demi anak namun tak lagi harmonis dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga. Tetapi terdapat suami istri yang sudah tak lagi harmonis namun bersepakat untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz* dikarenakan khawatir anak akan terkena dampak buruk dan tidak merasakan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya bila perceraian terjadi ketika anak belum *mumayyiz*. Perceraian akan ditempuh ketika anak sudah *tamyiz* dan mengerti keadaan yang terjadi dalam keluarganya tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 1. bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Sukabumi Indah tentang kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*? 2. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*? tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*, dan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 20 orang di masyarakat Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi, diantaranya yaitu 10 orang yang sudah menikah dan mempunyai anak, dan 10 orang yang mempunyai anak tetapi sudah bercerai, serta melalui dokumentasi yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder dan data tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 20 orang yang diwawancara, 14 orang diantaranya tidak setuju bila suami istri bersepakat untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*, menurut mereka bila suami istri selalu bertengkar dan tak bisa mengupayakan perdamaian maka jalan keluarnya adalah bercerai, namun setelah perceraian kewajiban orang tua terhadap anak harus tetap dijalankan. Kemudian 6 orang diantaranya setuju bila bersepakat untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*, karena perceraian adalah hal yang sangat dibenci Allah, selain itu mereka merasa kasihan dan juga khawatir akan berdampak buruk pada anak yang belum *mumayyiz*. Sedangkan hukum Islam tidak menjelaskan mengenai kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz* baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis, hanya saja bila dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslahatan meski sudah menempuh berbagai cara tetapi rumah tangga tak bisa dipertahankan maka jalan keluarnya adalah bercerai, namun cerailah dengan cara yang baik dan ma'ruf. Apabila rumah tangga tersebut tetap dilanjutkan dalam kondisi sudah tak lagi harmonis di dalamnya maka dikhawatirkan akan muncul sebuah kemudharatan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah agar tidak menimbulkan mudharat dan menghindar dari sebuah kemudharatan.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : KHIKMATUL LAILA

NPM : 1621010001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam

**Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG
KESEPAKATAN SUAMI ISTRI UNTUK
MENUNDA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
ANAK BELUM MUMAYYIZ (Studi di Kelurahan
Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

NIP. 195904161987031002

Pembimbing II

Sucipto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196612271995031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KESEPAKATAN SUAMI ISTRI UNTUK MENUNDA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ANAK BELUM MUMAYYIZ (Studi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Senin, 26 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H

Penguji I : Dr. Liky Faizal, M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.

Penguji III : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP 196210221993031002**

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

(Q.S An- Nisa (4) : 35)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak H. Warkham Mua'rrof (Alm) dan Ibu Siti Maryam, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara kandungku (Anwar Rifa'i, S.Kom, Tri Sabariyah, S.Pd.I, Muslimin, S.PI., Muslimah, Amd, Khanif, S.E) yang senantiasa memotivasi agar terselsaikannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku.
3. Saudara Iparku (Abdul Rohli, Henny Puspa, Indah Wati, S.T Fitri Yuliana, S.PI) yang selalu menghibur, selalu memberikan motivasi demi skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Khikmatul Laila, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 April 1999, anak keenam dari pasangan Bapak H. Warkham Mu'arrof (Alm) dan Ibu Siti Maryam.

Pendidikan dimulai dari SDN 2 Pahoman Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Bandar Lampung dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan di MAN 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Kesepakatan Suami Istri Untuk Menunda Perceraian Dengan Alasan Anak Belum *Mumayyiz*” (Studi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi). Terselsaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini saya ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak H. Rohmat, M.H.I selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan bapak Abdul Qadir Zaelani, S.H.I.,M.A. selaku sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi selesainya penulisan skripsi.

5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tuaku, Kakak-kakaku, terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
7. Kawan seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2016 yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita yang diinginkan.
8. Sahabat-sahabatku Alan Puspitasari, Ayu Khasanah, Indah Septiani, Olga Riska Pratiwi, Siti Robikatun, Sekar Nagita Bella, Yuli Asriyani yang selalu mengulurkan tangan dalam membantu penulisan skripsi, dan selalu memberi support satu sama lain.
9. Untuk Sahabat SMA ku, Ana Indriyani, Dwi Fitriyani, Sri Wahyuni, Krisdiyanti, Nadhilah Yusmarita, Permata Sari yang telah memberikan doa', dorongan, dan bantuan.
10. Untuk kawan seperjuangan skripsiku, Ayu Oktaviani, Dinny Anjani, Risna Wati, Sopia Nuraini, yang telah memberikan keceriaan, semangat dan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Kelompok 222 yang telah menemani suka dan duka, dan belajar bersama tentang banyak hal lainnya selama 40 hari.
12. Kepada Seluruh Masyarakat Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi yang telah bersedia diwawancara untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Semoga atas bantuan semua pihak Allah Swt berkenan memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Bandar Lampung, 07 Juni 2020

Penulis

Khikmatul Laila

1621010001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Dasar Hukum Perceraian.....	21
3. Rukun dan Syarat Perceraian	24
4. Macam-macam Perceraian	26
5. Alasan-alasan Perceraian	36
6. Akibat-akibat Perceraian.....	38
B. Penundaan Perceraian	
1. Pengertian Penundaan Perceraian	39
2. Dasar Hukum Penundaan Perceraian	41
3. Alasan-alasan Penundaan Perceraian.....	44
4. Keberadaan Anak Belum <i>Mumayyiz</i> Sebagai Alasan Untuk Menunda Perceraian.....	47
C. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Deskripsi Data Penelitian	62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pandangan Masyarakat Tentang Kesepakatan Suami Istri Untuk
Menunda Perceraian Dengan Alasan Anak Belum *Mumayyiz* 68
- B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat
Tentang Kesepakatan Suami Istri Untuk Menunda Perceraian
Dengan Alasan Anak Belum *Mumayyiz*..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 82
- B. Rekomendasi 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KESEPAKATAN SUAMI ISTRI UNTUK MENUNDA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ANAK BELUM MUMAYYIZ”(Studi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi)”**

1. Perspektif adalah suatu cara atau sudut pandang.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama.²
3. Pandangan adalah sudut fikiran atau pola pikir seseorang atau ramai.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1062

² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1087

4. Masyarakat adalah suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.⁴ Masyarakat yang akan diwawancarai pada penelitian ini yaitu masyarakat yang beragama Islam, baik wanita dan pria yang sudah menikah dan mempunyai anak.
5. Kesepakatan berasal dari kata sepakat yang artinya setuju; semufakat, atau sependapat. Sedangkan kata kesepakatan yaitu perihal sepakat atau konsensus.⁵ Kesepakatan yang dimaksud di sini yaitu kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.
6. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.⁶ Suami wajib mewujudkan keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.
7. Istri adalah wanita yang telah menikah atau yang bersuami.⁷ Istri merupakan pendamping bagi suami dalam kehidupan rumah tangga dan istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
8. Menunda yaitu menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan.⁸ Menunda yang dimaksud di sini yaitu menunda perceraian atas kesepakatan suami istri dengan alasan anak belum *mumayyiz*.

⁴ Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 26

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1042

⁶ *Ibid*, h. 1093

⁷ *Ibid*, h. 449

⁸ *Ibid*, h. 1503

9. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁹
10. Anak belum *mumayyiz* adalah seorang anak yang belum bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk dan pola pikir anak yang belum mampu memahami apa yang ada disekitarnya.¹⁰

Pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang kesepakatan suami istri yang menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz* dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji, hal ini mengingat pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Pasangan suami istri dapat bercerai dengan alasan-alasan yang dijelaskan pada peraturan tersebut. Namun pada realitanya ada sepasang suami istri yang dapat bercerai dengan alasan-alasan yang dibenarkan pada peraturan tersebut, tetapi mereka tetap mempertahankan rumah tangganya

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta :PT Interpratama Mandiri, 2016), h. 47

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 215

dan bersepakat untuk menunda perceraian karena mereka mempunyai anak yang masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum keluarga di mana perceraian adalah bagian dari kajian perkuliahan.
- b. Referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia di perpustakaan.
- c. Kemudahan mencari data di masyarakat, karena tempat penelitian sangat dekat dengan tempat tinggal peneliti.

C. Latar Belakang

Islam memandang bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri. Firman Allah Swt potongan dari surat Q.S An-Nisa' : (21) yang berbunyi sebagai berikut :

... وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan mereka isteri-isteri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat” (An-Nisa ayat 21).¹¹

Dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri.”¹² Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya niat aksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Agama Islam menganjurkan manusia untuk menikah bukan hanya untuk kebutuhan biologis semata, tetapi pernikahan mempunyai esensi pula yang perlu diperhatikan. Esensi dari pernikahan ialah menuruti perintah Allah Swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai, teratur, menciptakan ketenangan dalam jiwa dan menumbuhkan rasa cinta

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2010), h. 81

¹² Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Cet I, (Semarang: Dina Utama 2019), h.130

¹³ Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, (Semarang: Menara Kudus, 1975), h. 5

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

kasih.¹⁵ Selain itu, menikah juga telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadis berikut ini :

مَنْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ سَتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء

Artinya: Dari ‘Abdullah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda. “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin ini lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pegekang syahwat” (H.R Bukhari Muslim).¹⁶

Dalam menghindari terjadinya ketidakharmonisan yang akan membawa pada kehancuran rumah tangga, maka Islam memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak dengan memerhatikan kriteria seseorang.¹⁷ Kriteria-kriteria tersebut antara lain yaitu kecakapan, keturunan, kekayaan, dan agamanya. Orang yang mengutamakan kriteria agama, dijamin oleh Allah Swt akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁸ Dalam sebuah pernikahan yang baik dan bahagia serta dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam maka pernikahan tersebut akan tentram, damai dan akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Rumah tangga yang harmonis pasti akan selalu tercipta dalam keluarga apabila suami

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1991), h. 8

¹⁶ Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, (Malaysia: Klang Book Centre, 1997), Cet ke-5, Jilid III, h. 45

¹⁷ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 48

¹⁸ Uken Junaedi, Deny Riana, *On Being Great Lover: Menjadi Istri yang layak dicintai*, (Bandung: PT Karya Kita, 2008), h. 12

istri bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dan dapat menghadapi goncangan dalam mengayuh bahtera rumah tangga dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlandung pada kehendak dan kekuasaan-Nya dan juga selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁹ Sebaliknya, apabila suami istri mengabaikan ajaran agama, pasti akan sulit menciptakan suasana rumah tangga yang Islami. Jika suami istri sudah berlainan langkah dalam menilai perbuatan halal dan haram atau baik dan buruk, hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga.²⁰ Apabila dalam rumah tangga gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, lantaran keduanya berlainan tabi'at dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita maka dalam rumah tangga semacam ini tidak akan kita dapatkan tujuan, ketenangan, dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan Islam atas kehidupan suami dan istri.²¹ Guncangan dalam rumah tangga dapat diatasi dengan hati yang lapang, penuh dengan kasih sayang dan watak yang baik, dan jika diantaranya memiliki cinta yang saling timbal balik maka dasar-dasar pernikahan menjadi kokoh dan perceraian pun dapat dihindari.²² Namun, apabila rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka perceraian merupakan cara untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Perceraian adalah

¹⁹ Ali Qaimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003), h. 8

²⁰ Uken Junaedi, Deny Riana, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer....*, h. 14

²¹ *Ibid*, 20

²² *Ibid*, 24

pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²³

Dalam Islam perceraian dapat diartikan dengan istilah *thalak*. *Thalak* adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata yang khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117, yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara kedua suami istri maka Islam menganjurkan supaya diadakan dua orang *hakam* (pendamai) atau mediator diantara keduanya, kalau tidak juga berhasil maka *hakam* menetapkan perceraian antara keduanya dengan menjatuhkan talak satu.²⁴ Seandainya hukum Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat dan merupakan pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar suami istri mau berintropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.²⁵ Talak ini merupakan suatu yang disyaratkan, seorang suami boleh mentalak istrinya sampai dengan tiga kali, tetapi baiknya suami menjatuhkan talak satu demi satu sampai dengan tiga kali. Dengan demikian, agar keduanya dapat berpikir

²³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*...., h. 47

²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, h.112

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h. 205

panjang, apakah sepakat untuk bercerai atau akan rujuk kembali.²⁶ Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah : (229) secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.²⁷

Adapula didalam rumah tangganya terdapat konflik, tetapi tetap bersatu demi anak mereka yang belum *mumayyiz* dan pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk bercerai tetapi perceraian tersebut ditangguhkan atau ditunda, dan perceraian akan dilaksanakan ketika anak sudah mengerti keadaan didalam keluarganya. Faktanya seperti pasangan di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi yang bersepakat untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*. Pasangan suami istri tersebut bersepakat untuk menunda perceraian karena mereka khawatir anak mereka

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, h.117

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya dan membuat karakter anak menjadi tidak baik apabila mereka bercerai ketika anak masih kecil dan belum mengerti apa yang terjadi oleh kedua orang tuanya, maka dari itu mereka bersepakat untuk menunda perceraian. Dengan demikian, pada kasus tersebut apakah dalam Islam dapat membenarkan peristiwa itu dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian lebih lanjut lagi yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Kesepakatan Suami Istri Untuk Menunda Perceraian Dengan Alasan Anak Belum *Mumayyiz*”** (Studi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi).

D. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan terlebih dahulu supaya tidak adanya perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti memfokuskan kepada pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz* dan perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat mengenai masalah tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.

2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.

G. Signifikansi atau Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz* di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis, logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan selanjutnya

dicarikan cara pemecahannya.²⁸ Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan sebenarnya atau lapangan objek penelitian.²⁹ Pada penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk karya ilmiah ini.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik.³⁰ yakni mendeskripsikan seluruh data yang ada diperoleh secara jelas dan terperinci kemudian dianalisis dengan cermat untuk memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang perspektif hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat sekitar untuk menjadi narasumber dalam menjelaskan pendapat terkait masalah yang akan diteliti.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21

²⁹ Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 22

³⁰ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 53

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari tangan pertama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penelitian.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan masyarakat di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.³² Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu sekumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Data tersier ini dapat berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya, yaitu:

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* adalah proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Metode *interview* dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) pribadi responden, maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.³³

Pada penelitian ini, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan dan peneliti mewawancari masyarakat yang beragama Islam, pria dan wanita, sudah menikah dan mempunyai anak yang ada di Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung yang dapat memberikan pandangan atau keterangan yang berkaitan dengan masalah tentang kesepakatan suami istri yang menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti yang harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan observasi adalah pandangan masyarakat di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung terhadap kesepakatan suami istri yang menunda perceraian dengan

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

³⁴ *Ibid*, h. 66

alasan anak belum *mumayyiz*. Peneliti mengamati dan mencatat data-data setelah melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁵

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁶ Populasi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi yaitu sebanyak 8.151, adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Kelurahan Sukabumi Indah khususnya masyarakat yang sudah menikah, pria ataupun wanita dan sudah mempunyai anak.

Pada penelitian ini tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya dan diambil sebagian saja, yang disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu-individu penelitian. Sampel yang baik yaitu sampel yang

³⁵ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202

³⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.

memiliki populasi atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.³⁷

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penelitian berdasarkan seleksi khusus, maksudnya yaitu tidak semua individu dijadikan sampel. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang dapat dijadikan sebagai responden. Dalam penelitian ini penulis meneliti hanya sampai 3 RT saja dan mewawancari 20 orang sebagai sampel diantaranya terdapat 10 orang yang sudah menikah dan mempunyai anak, dan 10 orang yang mempunyai anak tetapi sudah bercerai. Hal ini dikarenakan dari 20 orang tersebut dapat mewakili jumlah populasi di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi.

6. Teknik Pengolah Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengkoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.³⁸ Dalam hal ini penulis membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 107

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Bhakri, 2004), h. 128

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, h. 73

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).⁴⁰

c. Sistematisasi Data (*Sistemizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴¹

7. Proses Analisis Data

Proses analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting yang harus dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari dari sendiri maupun orang lain.⁴²

Pada penelitian ini penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif dan dengan metode berfikir induktif. Metode analisis deskriptif ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat beserta alasan-alasannya di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi secara faktual yang didapat dari masyarakat Kecamatan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, h. 126

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 202

⁴² Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

tentang pandangan masyarakat terhadap kesepakatan suami istri yang menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz*. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

8. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁴³ Dalam penelitian kualitatif ini penulis memakai beberapa teknik kepercayaan (*credibility*). Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Kemudian pada hal ini data hasil penelitian tersebut dikumpulkan atau dianalisis sesuai dengan apa yang penulis lakukan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas antara lain teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan member *check*.⁴⁴

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 207

⁴⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologi kearah Penguasa Model Aplikasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h 204

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, apabila dalam rumah tangga mengalami perselisihan antara suami istri dan sudah tidak dapat lagi didamaikan maka perkawinan tersebut dapat putus dan berakhir. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁴⁵

Dalam KBBI, perceraian berasal dari kata “cerai” yang artinya pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁴⁶ Sedangkan arti perceraian yaitu prihal bercerai antara suami dan istri.⁴⁷ Kata bercerai sendiri maksudnya yaitu, “menjatuhkan talak atau memutuskan ikatan sebagai suami istri”.

KUH Perdata Pasal 207 menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang disebut

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 213

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 261

⁴⁷ *Ibid*

dalam Undang-Undang.

Perceraian menurut ahli fikih disebut dengan *thalak* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata اطلاق (*Ithlak*) yaitu memutuskan.⁴⁸ Sedangkan arti *furqoh* yaitu bercerai (lawan dari kata berkumpul), kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fikih sebagai suatu istilah, yang artinya perceraian antara suami dan istri.⁴⁹

Menurut istilah *syara'*, talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵⁰ Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* mengatakan,

أَطْلَقْتُ أَلَا سَيْرَ , إِذَا حَلَلْتُ فَيْدَهُ وَ أَرَسَلْتُهُ

Artinya: “Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepas dan membiarkannya.”⁵¹

Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 117 yang menegaskan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pada definisi perceraian atau talak di atas, jelaslah bahwa perceraian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menghilangkan sebuah ikatan perkawinan. Maka dari itu ikatan perkawinan sebenarnya dapat

⁴⁸ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darr Al-Fath Li Al-I'lami Al-Arobiy, 2000), h. 155

putus dengan tata cara yang telah diatur baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.⁵²

b. Dasar Hukum Perceraian

Menjaga keseimbangan rumah tangga bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, banyak faktor baik ekstern ataupun intern yang bisa menimbulkan konflik dalam berumah tangga. Faktor-faktor itu bisa berupa faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain-lain. Faktor-faktor ini kadangkala dapat diatasi dengan baik, namun tidak semua pasangan suami istri dapat mengatasi faktor-faktor tersebut, sehingga sampai pada akhirnya perceraian atau talak menjadi jalan keluarnya.⁵³

Istilah talak sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman itu suami bersikap liberal kepada istri. Ia bebas mentalak istrinya ketika sedang haid. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A bahwasannya dia pernah mentalak istrinya yang sedang haid, kemudian Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw dan bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرَّهَ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h. 207

⁵³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017) h. 128

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwasannya ia telah menceraikan isterinya ketika sang isteri sedang dalam haid pada zaman Rasulullah Saw. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “Perintahkan kepadanya agar dia merujuk isterinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu diserahkan kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa melepaskannya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para isteri yang ditalak dapat langsung menghadapi iddahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁴

Dari riwayat tersebut maka turunlah ayat sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَلِمَ سَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَنِ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, kemudian boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁵⁵

Seperti halnya firman Allah SWT dalam surat *At-Thalaq* : (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar).”⁵⁶

Selanjutnya firman Allah dalam surat *Al- Baqarah* : (227), yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁷

⁵⁴ Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), h. 528

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 36

⁵⁶ *Ibid*, h. 558

⁵⁷ *Ibid*, h. 36

Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang diharamkan namun sangat dibenci oleh Allah seperti hadis di bawah ini yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ أَحَاكِيمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ)

Artinya : Dari Ibnu Umar R.a, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih).⁵⁸

Pada hadits tersebut Nabi mengatakan bahwa talak merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak merupakan suatu alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, terlebih dahulu berusaha untuk berdamai antara kedua belah pihak, dan juga melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak.⁵⁹

Perceraian juga diatur dalam hukum negara, di antaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dimulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 41.
- 2) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai Pasal 36

⁵⁸ Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram....*, h. 527

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 213

- 3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang cara pemeriksaan sengketa perkawinan.
- 4) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada Bab XVI peraturan mengenai perceraian diterangkan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian.

c. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam perceraian atau talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Sedangkan syarat perceraian adalah sesuatu yang berkaitan dengan beberapa poin pada rukun perceraian atau talak. Apabila talak tidak memenuhi rukun dan syarat talak, maka talaknya tidak sah. Rukun perceraian atau talak ada 3 (tiga), yaitu suami, istri, dan sumpah talak. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat perceraian:

1) Suami

Suami adalah seseorang yang telah melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut hukum Islam, dan yang demikian itu pula ia mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak yang sah yang dijatuhkan oleh suami, ada 3 syarat yaitu:

- a) Suami harus berakal sehat, maka tidak sah talaknya anak kecil atau suami yang gila. Gila yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang yang hilang akalnya atau rusak akalnya karena sakit.
- b) Suami telah baligh, talak anak kecil yang belum baligh tidaklah sah, walaupun ia telah *mumayyiz* tetapi masih di bawah usia 10 tahun.
- c) Kemauan sendiri, yang dimaksud dengan kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak berdasarkan pilihannya sendiri. Maka, talak yang dijatuhkan suami karena dipaksa oleh orang lain, talaknya tidak sah.⁶⁰

2) Istri

Istri merupakan orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak. Syarat bagi istri yang dapat jatuh talaknya:

- a) Istri dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun istri masih dalam keadaan iddah talak raj'i. Istri yang ditalak bukan budak dari suaminya.
- b) Istri masih terikat oleh tali ikatan perkawinan yang sah.⁶¹

3) Sighat Talak

Sighat talak merupakan lafadz yang menunjukkan berakhirnya ikatan perkawinan, baik lafadz *Sharih* (jelas) maupun lafadz *Kinayah*

⁶⁰ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*..., h. 117

⁶¹ *Ibid.*

(sindirian), baik ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Terdapat 3 syarat sighat, yaitu :

- a) Lafadznya menunjukkan talak, baik *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindirian), oleh karena itu tidak mentalak istrinya dengan perbuatan.
- b) Lafadz yang diucapkan bermaksud ucapan talak, bukan karena keliru.
- c) Sengaja (*alqashdu*). *Qashdu* berarti mengucapkan talak kepada istrinya memang bermaksud untuk menceraikan istrinya bukan karena maksud lain.

d. Macam-macam Perceraian

1) Talak

Dalam hal ini, talak dapat dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah dicampuri oleh suami secara nyata. Dengan demikian, talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebagai talak satu atau dua.

Ketika istri dalam masa iddah, suami diperbolehkan merujuk istrinya tanpa akad nikah baru, tanpa wali dan saksi serta mahar baru. Namun apabila masa iddah istri telah habis kemudian suami

ingin rujuk dengan istrinya maka harus dengan akad nikah yang baru (*Tajdid An-Nikah*) dan dengan mahar yang baru pula.⁶²

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* artinya talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suaminya, atau karena suatu bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya *khulu*.⁶³ Talak *ba'in* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

(1) Talak *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sughra* yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Adapun yang termasuk ke dalam bagian talak *ba'in sughra* yaitu:

- (a) Talak karena fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama.
- (b) Talak pakai *iwad* (ganti rugi)
- (c) Talak karena belum dikumpuli.⁶⁴

(2) Talak *Ba'in Kubra*

Talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali apabila mantan istrinya telah kawin

⁶² *Ibid*, h. 100

⁶³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*..., h. 102

⁶⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*..., h. 35

dengan laki-laki lain dan telah bercampur sebagaimana suami istri secara nyata dan sah, dan juga istri tersebut telah menjalani masa iddahnya serta iddahnya telah habis pula.⁶⁵

Hukum talak *bai'n kubra* sama dengan talak *bain sughra*, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, tanpa ada niat *tahlil* kemudian bercerai. Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah : (230), yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”⁶⁶

Perlu diperhatikan bahwa hendaklah pernikahan yang kedua itu berdasarkan kemauan perempuan bukan karena kehendak suami yang pertama. Tegasnya bukan bermaksud supaya ia dapat menikah kembali dengan mantan suaminya, namun memang betul-betul dengan niat akan kekal sebagaimana pernikahan seperti biasanya.

⁶⁵ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*...., h. 102

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 36

c) Talak *Sunni* dan Talak *Bid'i*

Talak *Sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah.⁶⁷ Talak *sunni* dijatuhkan oleh suami ketika istri tidak dalam keadaan haid dan juga belum pernah dicampuri oleh suaminya.⁶⁸

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah dan tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.⁶⁹ Mengenai talak *bid'i* hukumnya haram dan talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini ada beberapa macam diantaranya, yaitu:⁷⁰

- (1) Apabila seorang suami mentalak istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- (2) Dalam masa suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- (3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dalam satu waktu dan tempat

⁶⁷ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*..., h. 108

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, h. 217

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Ceti I, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), h. 439

d) Talak *La Sunni Wala Bid'I*

Talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*. Ada beberapa talak yang termasuk kepada talak *la sunni wala bid'i*, yaitu:

- (1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- (2) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang sudah tidak haid lagi (menopause).⁷¹

e) Talak *Sharih*

Talak *sharih* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan kata-kata *At-Thalaq*, *Al-Firaq* atau *As Sara*. Ketiga kata ini jelas artinya yaitu untuk menceraikan istrinya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya seperti “engkau aku talak”, “aku pisahkan engkau”, “aku lepaskan engkau”.⁷²

f) Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata pada lafadz *sharih* tersebut.⁷³ Jika seorang suami berniat untuk mentalak istrinya dengan menggunakan lafadz *kinayah* (sindirian)

⁷¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*..., h. 110

⁷² *Ibid*, h. 112

⁷³ *Ibid*.

maka jatuh talaknya apabila lafadz yang diucapkan suami tersebut bertujuan untuk mentalak istrinya.⁷⁴

g) Talak *Munajjas* dan Talak *Mua'llaq*

Talak *munajjas* yaitu talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak juga disandarkan pada suatu masa yang akan datang dan tanpa adanya penangguhan. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “engkau aku talak”, maka istri sudah ditalak sesuai apa yang diucapkan oleh suaminya.⁷⁵

Talak *mu'allaq* adalah talak yang disandarkan pada masa yang akan datang, talak *mu'allaq* dilakukan dengan mengaitkan sighat talak dengan kata yang menunjukkan syarat atau yang sama artinya dengan itu, seperti bilamana dan sebagainya. Contoh, suami berkata kepada istrinya “engkau aku talak jika engkau keluar dari rumah ini”.⁷⁶

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jatuhnya talak yang bersyarat, fuqoha madzhab Hanafi dan Syafi'i mempunyai pendapat hal itu dianggap talak, berbeda dengan fuqoha lain yang mengatakan bahwa talak tersebut dianggap tidak sah bila tujuannya menyuruh melakukan sesuatu atau menolak untuk melakukannya.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid*, h. 113

⁷⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 241

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*

Dalam pandangan yang lain mengenai beberapa syarat untuk menentukan jatuhnya talak *mu'allaq* adalah:

- (1) Maksud suami mengatakan perkataan tersebut yaitu karena adanya niat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.
- (2) Peristiwa, tindakan atau waktu yang diisyaratkan itu mungkin bisa terjadi atau mungkin ada atau mungkin yang akan datang.⁷⁸

h) Talak *Takhyir* dan *Tamlik*

Talak *takhyir* adalah talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya dengan dua pilihan, yaitu apakah untuk melanjutkan rumah tangga atau akan bercerai. Apabila istri ingin bercerai maka ia telah ditalak.

Talak *tamlik* adalah talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya dengan mengatakan “aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “urusanmu berada ditanganmu sendiri. Apabila dengan perkataan itu, kemudian istri mengucapkan “berarti aku sudah ditalak” maka dengan itu ia ditalak satu (talak *raj'i*). Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa jika istri yang telah disertai tersebut mengucapkan “aku pilih ditalak tiga” maka ia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya. Dengan demikian, suami tidak

⁷⁸ *Ibid*, h. 243

boleh rujuk kepadanya kecuali setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki baru.⁷⁹

2) *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata *khala* yang artinya “menanggalkan”. *Khulu'* diartikan sebagai perceraian yang terjadi atas kemauan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami dikarenakan dalam rumah tangga mereka tidak lagi berjalan dengan baik dan telah timbul problem pada rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga telah tiada, yang ada hanya kecurigaan di antara suami istri.⁸⁰ Islam membolehkan *khulu'* kepada istri yang menghendaki perceraian, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁸¹

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sepakat, *khulu'* dipandang sah tanpa syarat alasan, namun termasuk tindakan yang kurang baik, sebab hal ini bertolak belakang dengan perintah Allah agar suami istri selalu mengupayakan agar hidup *mu'asyarah bil-ma'ruf*.⁸² Mengenai kebolehan terjadinya *khulu'* ini menurut kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah SWT:

⁷⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, h. 441

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 220

⁸² Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, h. 143

الطَّلُقَ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁸³

3) Syiqaq

Syiqaq adalah perselisihan, percekocokan dan pertengkaran. Syiqaq terjadi apabila pasangan suami istri mengalami pertentangan, perbedaan pendapat, dan pertengkaran memuncak sehingga kedua belah pihak tidak bisa mengatasinya dan tidak bisa menyelesaikannya. Maka pada kondisi tersebut diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak istri.⁸⁴ Diutusnya seorang *hakam* dengan maksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap konflik rumah tangga yang dihadapi

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

⁸⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, h. 164

oleh pasangan suami istri tersebut. Seperti firman Allah.Swt Surat An-Nisa : (35), yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁵

4) Fasakh

Fasakh adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan, hal ini terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (sah atau tidak sah) atau adanya masalah yang datang setelah berlakunya akad. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 231 yang berbunyi:

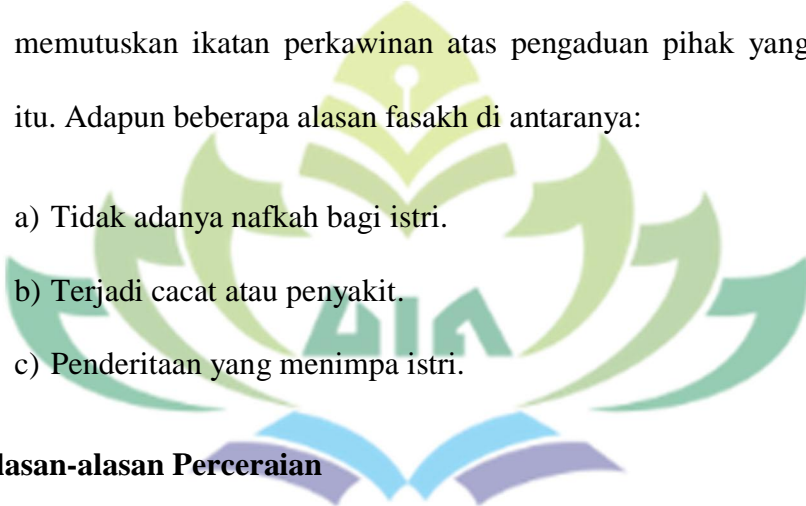
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁸⁶

Berdasarkan firman Allah tersebut menetapkan bahwa apabila dalam rumah tangga terjadi keadaan sifat atau sikap yang membuat kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita kemudharatan berhak untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim memutuskan ikatan perkawinan atas pengaduan pihak yang menderita itu. Adapun beberapa alasan fasakh di antaranya:

- 
- a) Tidak adanya nafkah bagi istri.
 - b) Terjadi cacat atau penyakit.
 - c) Penderitaan yang menimpa istri.

e. Alasan-alasan Perceraian

Dalam hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Alasan perceraian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

- 1) Zina, adanya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perzinaan itu

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37

sendiri dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.

- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja dengan niat tidak baik selama 5 tahun.
- 3) Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan sesudah perkawinan.
- 4) Melukai berat atau adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau istri, yang demikian sehingga menyebabkan luka-luka yang membahayakan.⁸⁷

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang lagi sama dengan bunyi pada Pasal 19 peraturan pelaksanaan, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sesudah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁸⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Pengabdian LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 168

- e) Salah satu pihak mempunyai cacat fisik atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami-istri;
- f) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian dapat diajukan berdasarkan dari salah satu alasan atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan dari yang telah ditentukan tersebut. Dari alasan-alasan itulah kemudian diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan.⁸⁸

f. Akibat-Akibat Perceraian

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga tidak semudah apa yang diinginkan. Perselisihan dan percekocan pasti terjadi, dalam keadaan seperti itu Islam menganjurkan agar tetap bersabar, merenungi kembali secara matang. Apabila suami tidak bisa menerima dan mentoleransi keadaan rumah tangga, maka suami boleh mentalak atau menceraikan istrinya.⁸⁹ Perceraian dapat menimbulkan akibat-akibat lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, di antaranya yaitu:

- 1) Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam masalah pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya.

⁸⁸ *Ibid*, 169

⁸⁹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah (Buku Pintar Aktivis Muslimah)*, (Jakarta: Robbani Perss, 2003), h. 556

- 2) Ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Pengadilan mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁹⁰
- 3) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁹¹

2. Penundaan Perceraian

a. Pengertian Penundaan Perceraian

Syari'at Islam memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya menjadikan talak atau cerai sebagai sebuah jalan keluar. Sebagaimana terhadap tuntunan yang lain, syari'at Islam juga memandang talak sebagai masalah agama dan dunia, dan pelaksanaannya harus selalu ditempatkan dalam hal yang tidak dimurkai Allah, dan kebaikan dunia juga tidak luput dari itu.

Perkawinan dengan berbagai adabnya dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman sosial bagi suami dan istri, anak-anak, dan masyarakat. Maka dari itu, talak atau cerai yang memutuskan dan menghilangkan ketenteraman sosial adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah.⁹²

Perselisihan dalam perkawinan dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan

⁹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-6, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1980), h. 44

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 226

⁹² Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah (Buku Pintar Aktivis Muslimah)....*, h. 555

menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami-istri dan tidak terdidiknya anak-anak mereka. Bagi suami atau istri yang belum dapat mengatasi perselisihan dalam perkawinan, harus bersabar dan tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai.⁹³ Meski yang telah diketahui, perceraian atau talak merupakan jalan terakhir apabila suami istri tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga.⁹⁴ Apabila memang harus bercerai antara suami dan istri, maka dituntut dari mereka ialah hendaknya perceraian itu dilakukan dengan cara yang patut dan baik, tanpa menyakiti dan tanpa mengada-ada, dan tidak menghilangkan haknya masing-masing.⁹⁵

Namun, dalam kehidupan rumah tangga terdapat pasangan suami istri di Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi yang mempertahankan rumah tangganya dan bersepakat untuk menunda perceraian dikarenakan mereka memiliki anak yang belum *mumayyiz* dan takun akan berdampak buruk pada anak yang belum memiliki wawasan yang luas.

Penundaan perceraian merupakan hasil dari sebuah kesepakatan atau keputusan baik berupa lisan ataupun tulisan yang sudah disetujui dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh suami istri tersebut untuk memperlambat dirinya agar tetap bertahan dalam rumah tangga yang telah hancur. Dengan arti lain, penundaan perceraian merupakan suatu cara atau sikap yang secara sengaja dan sadar untuk menunda atau memperlambat

⁹³ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Hukum Keadilan Progresif*, Vol 5 Nomor 1 (Maret 2014), h. 124

⁹⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 81

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Haram dan Halal*, (Jakarta: Robbani Pers, 2000), h. 245

dan juga bertahan pada rumah tangga yang telah hancur. Menunda atau memperlambat berarti bahwa dalam diri suami istri tersebut ingin bercerai namun akan dilakukan pada waktu yang tepat untuk bercerai, ketika anak sudah *tamyiz* dan sudah mengerti keadaan di sekitarnya, karena perceraian bukan hal yang mudah dimengerti oleh anak-anak, terlebih anak itu masih di bawah umur.⁹⁶ Perubahan perilaku juga sering kali terjadi pada anak yang mengalami perceraian dan bentuknya beragam. Pada anak yang belum *mumayyiz*, mereka pasti merasakan sedih, lebih sering menangis, dan cenderung lebih banyak menuntut.⁹⁷

b. Dasar Hukum Penundaan Perceraian

Pada dasarnya hukum talak atau perceraian dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) ataupun inisiatif istri (khulu').⁹⁸ Perceraian merupakan upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami dan istri telah ditempuh namun tidak berhasil. Meskipun demikian, bila hubungan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan pasti akan menimbulkan kehancuran dan kemudharatan.⁹⁹ Sedangkan Allah Swt menyuruh seluruh umatnya untuk menghilangkan kemudharatan. Seperti Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat : (231) yang berbunyi:

⁹⁶ Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, 2011), h. 7

⁹⁷ *Ibid.* h. 9

⁹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h. 208

⁹⁹ Gandhi Liyorba Indra, *Analisis Perceraian di luar Pengadilan Studi Komparasi Hukum Malaysia dan Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 19

.... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ﴿٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”¹⁰⁰

Dalam potongan ayat di atas menceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya. Kemudian sebelum masa iddah istrinya itu usai dia merujuknya kembali. Setelah itu dijatuhkan talak lagi kemudian merujuknya kembali. Hal ini dilaksanakan untuk menyakiti dan menganiaya istrinya tersebut. Selanjutnya ayat ini melarang seorang suami melakukan rujuk kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti dan menganiaya. Larangan Allah ini juga menggambarkan dari tindakan sahabat Sabit bin Yasar yang telah diuraikan dalam hal sebab turunnya ayat ini. Suami yang berbuat demikian adalah menganiaya dirinya sendiri, suatu perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan dengan kaum kerabat keluarga istrinya dan juga dibenci oleh masyarakat, dan akhirnya nanti ia tidak luput dari kemurkaan Allah.¹⁰¹

Selanjutnya Firman Allah dalam surat At- Thalaq ayat 6

.... وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِّتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”¹⁰²

Dalam potongan ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 386

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559

dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersama dia, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenanginya.¹⁰³

Ayat-ayat di atas menjadi sebuah petunjuk bahwasannya kemudharatan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam urusan rumah tangga karena kemudharatan bisa mengancam kehidupan manusia.

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا)

Artinya: Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan."¹⁰⁴

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

لِضَرَرٍ لَا يُزَالُ بِإِضْرَارٍ سَوَاءً كَانَ عَامًّا أَوْ خَاصًّا

Artinya: "Mudharat tidak bisa dihilangkan oleh mudharat lainnya, baik bersifat umum maupun terbatas".¹⁰⁵

الضَّرَرُ يُزَالُ

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Juz 28,29,30), (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 209

¹⁰⁴ Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr Ash-Shuyuti, *Al-Asybah Wa Nazhair Fi Qawaid Wa Furu' Syafi'iyah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979) h. 83

¹⁰⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 20

Artinya: "Kemudharatan itu wajib dihilangkan".

Berdasarkan firman Allah, sabda Rasulullah Saw serta kaidah Fiqiyah, dalam hal kesepakatan suami istri untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum mumayyiz, dan apabila di selama itu antara suami dan istri terdapat sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita kemudharatan dapat mengambil jalan untuk memutuskan perkawinan.¹⁰⁶

c. Alasan-alasan Penundaan Perceraian

Keputusan untuk bercerai dilakukan bagi mereka yang sudah siap secara mental dan fisiknya, karena perceraian berarti menghilangkan ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Pada kasus yang terjadi, penundaan perceraian dilakukan karena lebih mementingkan kondisi anak. Beragam pandangan yang dikemukakan dari mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena masalah ekonomi, anak, dan sosial budaya. Berikut ini adalah penjelasannya:

1) Ekonomi

Kedudukan suami bukan hanya sebagai kepala keluarga, namun ia juga wajib memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, tetapi terkadang kewajiban tersebut sering diabaikan dan tak jarang istri yang tidak sabar akan menjadikan hal itu alasan untuk menggugat cerai.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*...., h. 166

¹⁰⁷ Husin Anang Kabamay, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya Dengan Perceraian". *Jurnal Tahkim*, Vol XI No 1 (Juni, 2015) h. 55-56

Namun, adapula sepasang suami istri yang menunda perceraian dengan alasan istri yang tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga dan memiliki anak yang masih sangat kecil. Apabila perceraian terjadi maka itu merupakan hal yang menakutkan secara ekonomi, karena istri belum mampu membiayai dirinya sendiri dan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kebutuhan yang banyak. Maka dari itu mereka memilih bertahan dan bersepakat untuk menunda perceraian.

2) Anak

Alasan selanjutnya yaitu dikarenakan anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh.

Menjadi orang tua tidak cukup jika hanya menghadirkan anak dan kedua orang tua dikatakan layak menjadi ayah dan ibu manakala mereka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak mereka. *Parenting* atau mendidik anak-anak dapat digambarkan sebagai rangkaian tindakan, perbuatan, dan komunikasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak-anak agar dapat tumbuh dan kembang sesuai dengan pola asuh yang baik dan benar. *Parenting* merupakan tindakan

intensif kedua belah pihak untuk mengasuh, mendidik, mengayomi, melindungi dan membesarkan anak-anak.¹⁰⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan orang tua dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk mewujudkan karakter anak menjadi baik, maka bila salah satu pihak tersebut hilang atau terjadinya perceraian maka dalam keluarga tersebut akan terguncang dan psikologis anak akan terganggu. Pengaruh perceraian sangat berdampak bagi anak, dan perceraian dalam keluarga merupakan faktor yang menyebabkan anak berperilaku nakal di dalam bersosialisasi.¹⁰⁹

Dalam hal ini, berkaitan dengan alasan penundaan perceraian. dimana suami istri yang bersepakat untuk menunda perceraian dengan alasan anak belum *mumayyiz* karena khawatir akan menimbulkan bencana pada anaknya apabila kedua orang tuanya berpisah.

3) Sosial

Rumah tangga memiliki pengaruh sosial yang luar biasa pada diri seorang anak. Corak kehidupan sosial anak pada masa yang akan datang bergantung pada dasar-dasar yang dibangun rumah tangga dan kemajuan ataupun kemunduran seseorang dalam kehidupan sosialnya amat bergantung pada pembinaan yang dilakukan keluarga pada masa kanak-

¹⁰⁸ E.B. Surbakti, *Parenting Anak-anak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h.9

¹⁰⁹ Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 454

kanaknya.¹¹⁰ Selain dari itu, rumah tangga merupakan asas kebudayaan dan pembentuk gaya pemikiran seorang anak. Mulai dari pengetahuan, pandangan dan filsafat dalam hidupnya, sikap yang diambil dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, kebiasaan, bahasa, dialek, dan tata nilai yang didapat anak, semua itu bermula dari rumah tangga. Rumah tangga juga sarana terpenting untuk meneruskan kebudayaan sosial dan membentuk para individu agar memiliki cara berpikir dan cara pandang khas dalam kehidupan. Kondisi kebudayaan tersebut berasal dari kebudayaan yang ada dalam keluarganya.¹¹¹

Dalam hal sosial ini. Maka, terdapat suami istri yang bertahan dan bersepakat untuk menunda perceraian agar dapat menanamkan sosial budaya dengan baik pada setiap anggota keluarganya pada anak yang belum mumayyiz.

d. Keberadaan Anak Belum Mumayyiz Sebagai Alasan Untuk Menunda Perceraian

Ketika perceraian terjadi maka berpengaruh pada komunikasi suami istri, meskipun keduanya merasakan ketenangan karena tiada lagi perlakuan buruk dari pihak masing-masing. Namun anak-anak akan mendapatkan lebih banyak kerugian dari pada orang tuanya, karena keberadaan mereka di tengah-tengah kedua orang tuanya mempunyai makna yang sangat penting dan mendalam di jiwa mereka, karena anak takkan tumbuh sempurna dan stabil tanpa keutuhan ayah dan ibunya apabila anak

¹¹⁰ Ali Qaimi, *Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), h. 9

¹¹¹ *Ibid*, h. 10

kehilangan salah satu peran orang tuanya pada usia belum *mumayyiz*, maka hal itu akan berpengaruh buruk terhadapnya, bahkan dapat menggiringnya ke perilaku yang buruk.¹¹²

Keberadaan anak yang belum *mumayyiz* dijadikan alasan untuk menunda perceraian, karena anak belum *mumayyiz* merupakan seorang anak yang belum bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk dan pola pikir anak yang belum mampu memahami apa yang ada di sekitarnya. Ketika anak sudah *mumayyiz* maka ia sudah bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal.¹¹³

Untuk mengarahkan anak yang belum *mumayyiz* dalam menanamkan nilai-nilai yang baik, maka perlu adanya kerjasama antara ayah dan ibu. Ketika anak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya yang utuh maka itulah yang membuat anak merasa aman dan bahagia. Sehingga fisik, intelektualnya, dan jiwanya berkembang paripurna. Sebaliknya, apabila anak tidak memperoleh cinta dan kesempatan mencintai pada awal kehidupannya maka akan menjadikannya mengisolasi diri, menjauhkan diri dari orang tuanya, terlambat dalam perkembangan

¹¹² Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki....*, h. 453-454

¹¹³ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 487

fisik, intelektual, jiwa, bahasa dan sosialnya, dan dalam keperibadiannya mengalami penderitaan.¹¹⁴

Pada masa kanak-kanak awal, terutama pada saat berusia sembilan bulan sampai delapan belas bulan merupakan masa yang paling kritis yang dapat menimbulkan bencana pada anak bila ia berpisah dari orang tuanya. Dalam buku karangan Adnan Hasan Shalih Baharits yang berjudul “*Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*” menyebutkan bila terjadi percekocokan dalam rumah tangga, maka suami tidak diperkenankan mengambil keputusan cerai pada masa seperti itu. Tetapi sang suami harus bersabar dan penuh pengertian serta menangguhkan atau menunda untuk cerai atau talak atas istrinya sampai waktu yang tepat yang disyariatkan, sesudah keduanya melakukan berbagai upaya perbaikan.¹¹⁵

Maka dari itu, keberadaan anak belum *mumayyiz* menjadi sebuah alasan untuk menangguhkan atau menunda perceraian. Kemudian sighat talak akan diucapkan pada waktu yang tepat yang telah disepakati bersama.

B. Tinjauan Pustaka

Terdapat banyak kajian yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam berbagai judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

¹¹⁴ Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*...., h. 446

¹¹⁵ *Ibid*, h. 447

1. Skripsi Yani Tri Zakiah (2005) dengan judul *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*.¹¹⁶ Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu jika dilihat dari jenisnya, maka jenis penelitian nya yaitu deskriptif analitik, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik *interview*, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo diantaranya yaitu mengenai tingkah laku pasangan yang tidak baik, meninggalkan kewajiban, masalah ekonomi, kawin di bawah umur, penganiayaan, adanya pihak ketiga, tidak lagi harmonis. Faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi adanya perceraian. Setelah perceraian terjadi maka timbullah akibat atau dampaknya. Diantaranya yaitu dampak terhadap suami/ istri, pada hal ini perceraian membawa konsekuensi yuridis bahwa setelah adanya perceraian maka mereka sudah tidak ada ikatan dalam pernikahan yang sah, dan mantan pasangan bebas memilih apakah akan menikah dengan orang lain atau tetap sendiri dengan status janda ataupun duda.¹¹⁷ Dampak perceraian selanjutnya yaitu, anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan seing diliputi perasaan dendam, benci sehingga anak menjadi liar dan tak memiliki moral yang baik.

¹¹⁶ Yani Tri Zakiah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Skripsi, (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005), h. 67

¹¹⁷ *Ibid*, h. 150

Selanjutnya dampak terhadap harta kekayaan, adanya pembagian harta bersama, pengelolaan, penanggung jawab atau pemelihara anak. Dalam hal pemeliharaan kekuasaan wilayah al-mal yaitu memelihara kekayaan si anak dan kepentingan-kepentingannya yang berhubungan dengan harta kekayaan, dilakukan oleh ayah sampai anak bisa mampu mengurus sendiri dan sudah mandiri.¹¹⁸

2. Skripsi A. Besse Suci Rezki Kasih (2017), dengan judul *“Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”*. Metode yang digunakan jika dilihat dari jenisnya, maka jenis penelitiannya menggunakan penelitian yuridis syar’ih, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik *interview*, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian skripsi A. Besse Suci Rezeki Kasih, menjelaskan bahwa perceraian adalah hal yang berat bagi setiap anggota keluarga termasuk orang tua, ketika orang tua bercerai anak akan merasa sangat terpuak apabila karena merekalah orang tua bercerai. Kemudian implikasi perceraian terhadap psikologis anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng antara lain yaitu anak mempunyai sifat menyangkal, rasa malu dan tidak percaya diri, mengalami kesedihan, anak menjadi pendiam, anak sering kali mempunyai rasa bersalah, anak mulai menderita

¹¹⁸ *Ibid*, h. 163

kecemasan tinggi dan ketakutan, dan anak bisa membenci salah satu dari orang tuanya.

Untuk mengatasi dampak perceraian maka harus ada upaya yang dilakukan, hal ini seperti komunikasi yang baik dan jelaskan alasan untuk bercerai agar anak dapat menerimanya, upaya lain yaitu setelah bercerai orang tua tetap mengasuh anak bersama-sama dengan menyampingkan perselisihan, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Hal tersebut dapat meminimalisir dampak buruk terhadap psikologi anak.¹¹⁹

3. Skripsi Didik Priyana, yang berjudul "*Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak dan ekonomis anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Desa Logede Kec.Sember Kab. Rembang)*". Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara observasi, *interview*, dan dokumentasi. Penelitian termasuk menggunakan metode kualitatif.¹²⁰

Dari hasil penelitian skripsi Didik Priyana, menjelaskan bahwa ketika dalam rumah tangga ada suatu persoalan atau permasalahan, seharusnya permasalahan tersebut tidak berujung pada sebuah perceraian. Perceraian disebabkan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor perselingkuhan, dan lain-lain. Dari perceraian tersebut dapat

¹¹⁹ A. Besse Suci Rezeki Kasih, *Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppong*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2017), h. 70

¹²⁰ Didik Priyana, "*Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak dan ekonomis anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Desa Logede Kec.Sember Kab. Rembang)*", Skripsi, (Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2011), h. 104

membawa dampak terhadap pasangan maupun terhadap anak. Dampak perceraian yang paling pahit dirasakan adalah dampak terhadap anak-anaknya, khususnya dampak Psikologis dan dampak ekonomis.

Secara psikologis adanya perubahan sikap dan perbuatan dalam diri anak, seperti anak mudah marah, anak pemalu, pendiam, pemurung, depresi. Tetapi perubahan sikap tersebut tidak selalu disebabkan oleh perceraian orang tuanya, akan tetapi telah ada sebelum perceraian orang tuanya, hanya saja setelah perceraian orang tuanya sikap anak semakin memburuk.

Secara ekonomis, adanya kesulitan dalam hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Karena yang biasanya memenuhi kebutuhan dua anak, setelah perceraian otomatis berubah menjadi satu orang saja. Sehingga pemenuhan kebutuhan anak menjadi terabaikan. Perubahan anak tersebut tidak selalu dampak negatif, tetapi ada juga perubahan yang positif.¹²¹

¹²¹ *Ibid*, h. 105

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990)

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Bhakri, 2004)

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan, 2012)

Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah (Buku Pintar Aktivis Muslimah)*, (Jakarta: Robbani Perss, 2003)

Ali Qaimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenadamdia Group, 2004)

Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyyah*, (Kairo: Darul Hadist, 2005)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologi kearah Penguasa Model Aplikasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Cet I, (Semarang: Dina Utama 2019), h.130

- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019)
- E.B. Surbakti, *Parenting Anak-anak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Gandhi Liyorba Indra, *Analisis Perceraian di luar Pengadilan Studi Komparasi Hukum Malaysia dan Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018),
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-6, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1980)
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Pengabdian LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Luh Surini Yulia Savitri, *Pengaruh Perceraian Pada Anak*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, 2011)
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989)
- Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, (Malaysia: Klang Book Centre, 1997), Cet ke-5, Jilid III
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1991)
- Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, (Semarang: Menara Kudus, 1975)
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Nasruddin, *Fikih Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017)
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Interpretama Mandiri, 2016), h. 47
- Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)

- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darr Al-Fath Li Al-I'lami Al-Arobiy, 2000)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21
- Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 80
- Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998)
- Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fii Khilli Ghayatu Al-ikhtishari*, (Beirut: Dar Al Kutub, t.t)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Uken Junaedi, Deny Riana, *On Being Great Lover: Menjadi Istri yang layak dicintai*, (Bandung: PT Karya Kita, 2008)
- Yusuf Qardhawi, *Haram dan Halal*, (Jakarta: Robbani Pers, 2000)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)
- Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016)

Jurnal

- Husin Anang Kabamay, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya Dengan Perceraian". *Jurnal Tahkim*, Vol XI No 1 (Juni, 2015)

Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Hukum Al-Adalah*, Vol X Nomer 4 (Juli 2012)

Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Hukum Keadilan Progresif*, Vol 5 Nomor 1 (Maret 2014)

Skripsi, Tesis, Disertasi

A. Besse Suci Rezeki Kasih, *Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppong*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar, 2017)

Didik Priyana, “*Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak dan ekonomis anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Desa Logede Kec.Sember Kab. Rembang)*”, Skripsi, (Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2011)

Mohammad Ridwan Hakim “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*”. (Skripsi Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Cirebonm 2012)

Yani Tri Zakiah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Skripsi, (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005)

